



IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA (Studi Kasus Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima)

Nabila Alfauziah¹, Muhammad Ali², Iskandar³

nabilaalfauziah54@gmail.com¹, khidiralihsan@gmail.com², iskandarnjali94@gmail.com³

Universitas Muhammadiyah Mataram

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi penyaluran Dana Desa dalam meningkatkan infrastruktur jalan di Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. Dana Desa merupakan instrumen penting dalam pembangunan pedesaan yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Dana Desa telah memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan kesejahteraan masyarakat, implementasinya masih terkendala oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran, kondisi geografis, cuaca ekstrim, serta lemahnya koordinasi dan pengawasan. Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan masih rendah, yang turut mempengaruhi kualitas dan pemerataan hasil pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas teknis, transparansi anggaran, serta strategi perencanaan yang adaptif menjadi hal yang penting untuk memastikan Dana Desa dapat dimanfaatkan secara optimal, akuntabel, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan desa.

Kata Kunci: Dana Desa, Infrastruktur Jalan, Implementasi, Pembangunan Desa, Desa Ngali.

Abstract: This study aims to examine the implementation of Village Fund distribution in improving road infrastructure in Ngali Village, Belo District, Bima Regency. The Village Fund is a crucial instrument in rural development, designed to accelerate infrastructure development, basic services, and community empowerment. Using a descriptive qualitative approach, this research collected data through field observations, in-depth interviews, and document analysis. The findings indicate that although the Village Fund has contributed positively to road infrastructure development and community welfare, its effectiveness is still hindered by several factors such as limited budget, challenging geographical conditions, extreme weather, and weak coordination and supervision. Furthermore, community participation in the planning and monitoring process remains low, which affects the quality and equity of development outcomes. Therefore, enhancing technical capacity, ensuring budget transparency, and implementing adaptive planning strategies are essential to optimize the utilization of Village Funds in a more accountable, effective, and sustainable manner to support rural development.

Keywords: Village Fund, Road Infrastructure, implementation, Rural Development, Ngali Village.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Dalam rangka mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah telah meluncurkan program Dana Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada Pasal 71, keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa (Lutfiatin et al., 2024).

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat desa, serta penanggulangan kemiskinan. Seluruh program dan kegiatan tersebut dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) berdasarkan identifikasi permasalahan, potensi lokal, aspirasi masyarakat, serta prioritas pembangunan desa. Pemerintah pusat menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan wilayah pedesaan melalui alokasi anggaran khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang disalurkan ke desa-desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk kemudian digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. (Lutfiatin et al., 2024)

Desa Ngali, yang terletak di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan salah satu desa yang secara rutin menerima alokasi Dana Desa dalam jumlah signifikan. Pada tahun 2021, desa ini memperoleh dana sebesar Rp1.051.649.300. Namun, realisasi pembangunan infrastruktur di Desa Ngali masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketimpangan antar wilayah dusun. Dari total 12 dusun, hanya 5 dusun yang memperoleh pembangunan infrastruktur yang memadai, sedangkan dusun lainnya masih tertinggal. Ketimpangan ini tercermin pula dari kondisi jalan penghubung antar kecamatan, seperti Jalan Lintas Tente–Karumbu, yang masih memerlukan perbaikan. Hal ini diduga disebabkan oleh lemahnya mekanisme distribusi dana, kurangnya transparansi, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi penyaluran Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002), bahwa metode kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati secara naturalistik tanpa manipulasi terhadap situasi. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling tepat untuk menggambarkan secara mendalam fenomena pengelolaan Dana Desa di Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, yang melibatkan analisis terhadap dinamika sosial dan realitas kompleks yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui data kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta analisis dokumen resmi guna memahami baik aspek

formal seperti kebijakan dan regulasi, maupun praktik nyata di lapangan, termasuk tantangan serta peluang yang dihadapi dalam pengelolaan dana tersebut. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola atau tema yang muncul dari data, yang dapat dikaitkan dengan teori-teori relevan atau dijadikan dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai Implementasi pengelolaan Dana Desa di Desa Ngali dan menghasilkan temuan yang dapat digunakan untuk mendukung peningkatan tata kelola Dana Desa yang lebih baik di masa mendatang.(Mingkid et al., 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis wilayah desa ngali terletak disebelah Selatan pusat kecamatan belo dengan batas-batas wilayah administrasi yaitu sebelah utara desa renda, sebelah timur desa sambori, sebelah Selatan desa lido, sebelah barat desa monta. Desa Ngali memiliki luas wilayah 1.420 Ha terdiri dari 5 dusun. yaitu dusun rade bari, dusun benteng, dusun kabuju, dusun sigi dan dusun lewi. 22 rukun tetangga (RT) serta 8 rukun warga (RW). Kantor Desa Ngali berada didusun kabuju, dusun terjauh dari pusat pemerintahan desa adalah dusun lewi. Selain itu, struktur pemerintahan desa diorganisasikan ke dalam 8 Rukun Warga (RW) dan 22 Rukun Tetangga (RT), yang berfungsi untuk memfasilitasi koordinasi sosial dan administrasi di tingkat masyarakat. Pembagian ini bertujuan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan desa. (Aermadepa, 2019)



Gambar 1. Wawancara dengan pemerintah desa ngali terkait penyaluran dana desa

Berdasarkan data dari Kantor Desa Ngali tahun 2024, jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa Ngali pada tahun tersebut mencapai total Rp.1.051.649.300. Pada tahap pertama, dana yang disalurkan sebesar Rp.495.942.900 dan digunakan untuk pembangunan infrSelanjutnya, pada tahap kedua, dana yang disalurkan terdiri dari 60% dengan penggunaan yang telah ditentukan, yaitu sebesar Rp.405.243.200, serta 40% lainnya yang juga telah ditentukan penggunaannya, yaitu sebesar Rp.150.463.200. Dengan demikian, total dana yang disalurkan pada tahap kedua mencapai Rp.555.706.400.

Pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur harus dimulai dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas guna memastikan implementasi dan keberlanjutan pembangunan di tingkat desa.



Gambar 2. Wawancara dengan pengelola Proyek infrastruktur jalan desa ngali.

Berdasarkan hasil wawancara, Pelaksanaan perbaikan jalan di Desa Ngali menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama, mengakibatkan tidak semua usulan pembangunan dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Selain itu, faktor eksternal seperti cuaca, khususnya pada musim hujan, turut memperlambat proses pelaksanaan proyek. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah koordinasi sosial dengan masyarakat, terutama dalam hal pembebasan lahan dan perubahan akses jalan yang kerap menimbulkan penolakan atau keberatan dari warga. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan finansial, tetapi juga sangat bergantung pada dukungan sosial dan komunikasi yang efektif antara pihak pelaksana dan masyarakat. (Lutfiatin et al., 2024)



Gambar 3. Wawancara dengan Masyarakat Di desa ngali

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat desa ngali terkait kualitas dan kesesuaian anggaran Pembangunan jalan didesa ngali bahwa harapan masyarakat terhadap kualitas pembangunan infrastruktur, khususnya jalan di Desa Ngali. Masyarakat desa menekankan pentingnya pembangunan jalan yang berkualitas dan berumur panjang agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh warga., Selain itu, masyarakat juga menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pengerjaan proyek agar hasil yang dicapai benar-benar sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menginginkan pembangunan, tetapi juga menginginkan akuntabilitas dan Implementasi dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan desa.



Gambar 4. Kondisi jalan di Desa Ngali

Kondisi jalan di Desa Ngali saat ini sangat membutuhkan koordinasi yang optimal antara pemerintah desa dan masyarakat setempat guna memastikan keberlanjutan pembangunan yang merata. Implementasi distribusi Dana Desa di Desa Ngali memang telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti melalui pembangunan jalan tani, pagar bronjong, dan drainase yang berkontribusi dalam meningkatkan aksesibilitas serta mendukung sektor pertanian. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang sulit dijangkau, cuaca ekstrem, serta hasil pembangunan yang belum sepenuhnya memenuhi standar kualitas. Pengawasan penggunaan dana telah diupayakan melalui penyediaan papan informasi anggaran untuk mendorong transparansi, tetapi masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan masyarakat yang menimbulkan persepsi kurangnya keterbukaan. Selain itu, faktor cuaca yang tidak menentu sering kali menghambat proses pelaksanaan proyek dan menurunkan kualitas hasil pembangunan, terutama pada infrastruktur seperti jalan dan drainase. Minimnya kapasitas teknis dan perencanaan adaptif di tingkat desa turut memperburuk kondisi tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat serta strategi mitigasi risiko cuaca dalam perencanaan pembangunan, agar Dana Desa dapat dimanfaatkan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. (Gusmeri, 2019)

KESIMPULAN

Penyaluran Dana Desa di Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, terbukti memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, Implementasinya masih belum optimal akibat berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kondisi geografis, cuaca ekstrem, serta lemahnya pengawasan dan koordinasi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan perencanaan masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan proyek sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang adaptif, peningkatan kapasitas teknis, serta penguatan transparansi dan partisipasi masyarakat untuk mendorong pemanfaatan Dana Desa yang lebih efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aermadepa, A. (2019). Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan Dan Masa Depan. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.31604/justitia.v1i2.1-14>
- Gusmeri, M. . (2019). EFEKTIFITAS DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI

MASYARAKAT DI KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH.

- Hadiyanto. (2020). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Pengembangan Wilayah*, 8(1), 45-58.
- Harsin, A. (2018). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal JEKAPE*, 5(1), 1–17.
- Hutomo, M. Y. (2000). *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Gramedia.
- Implementasi, dkk. (2022). Tantangan dan Hambatan Dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 120-134.
- Lutfiatin, D. I., Kristinawati, R., Nugoro, I. A., Pratama, M. H., Lestari, V., Astuti, E., Anggita, A., Amalia, S., Putriana, A., Islam, P. A., Tarbiyah, J., Islam, U., Fatmawati, N., Bengkulu, S., & Koresponding, E. (2024). PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA LOKASI BARU SELUMA: KONTRIBUSI MAHASISWA KKN TERHADAP PEMBANGUNAN DESA INCREASING COMMUNITY PARTICIPATION IN VILLAGE DEVELOPMENT IN NEW SELUMA LOCATION : STUDENTS ' CONTRIBUTION TO VILLAGE DEVELOP. 3(4), 413–419. <https://doi.org/10.58184/mestaka.v3i4.436>
- Mingkid, G. J., Liando, D., & Lengkong, J. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan. *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 3–4.